

Diinterupsi Anggota DPR Saat Bicara, Mahfud: *Setiap ke Sini Saya Dikeroyok*

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memprotes sikap anggota Komisi III DPR yang hendak menginterupsinya saat menjelaskan soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, Rabu (29/3).

Momen tersebut terjadi ketika Mahfud sedang berbicara soal alasannya mengungkapkan indikasi transaksi janggal tersebut, tetapi ada anggota Komisi III yang ingin menyampaikan interupsi.

"Saya enggak mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda, masa orang ngomong diinterupsi? Nanti lah pak," kata Mahfud menghentikan penjelasannya.

Mahfud lantas meminta agar tidak ada anggota DPR

yang menginterupsinya karena penjelasannya tidak akan selesai apabila terus-terusan diinterupsi. Mahfud merasa selalu diinterupsi setiap rapat dengan Komisi III DPR.

"Saya setiap ke sini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong sudah diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi," ujar Mahfud.

Wakil ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilakan Mahfud MD untuk melanjutkan penjelasannya. Kemudian, Sahroni meminta agar interupsi disampaikan setelah Mahfud menyelesaikan paparannya.

"Pak Mahfud kita teruskan saja dulu, yang interupsi biar nanti," ujar Sahroni. ● han

Capres Gerindra Hanya Prabowo, Sandiaga Uno Silakan Geser ke PPP

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman menegaskan, tidak ada calon presiden (capres) selain Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Seab itu, ia mempersilakan agar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno untuk pindah partai apabila tetap ngotot maju menjadi capres 2024.

"Tidak mungkin ada capres selain Pak Prabowo, realitas politiknya seperti itu. Jadi ya monogami, kalau Pak Sandiaga geser, kita bikin halus saja jadi geser ke PPP. Kita tidak akan menghalangi beliau," ujar Habiburrokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3).

Menurut Habiburrokhman, PPP adalah partai sahabat Gerindra. Hanya saja, Gerindra tidak bisa blak-blakan menyuruh Sandiaga pindah ke PPP.

Namun demikian, dirinya mengingatkan kalau seseorang pasti berpolitik sesuai dengan kebutuhan dan pilihan mereka masing-masing.

"Kalau ada yang cocok dengan partai lain, itu hak. Dan kita hormati, karena itu bukan sesuatu yang jelek. Dan pindah partai bukan sesuatu yang tidak terpuji," tuturnya.

Soal pertemuan antara Prabowo dan Sandiaga pada Senin (27/3) sore, Habiburrokhman mengaku tidak tahu secara persis apa yang mereka bahas. Akan tetapi, dirinya meyakini Sandiaga dan Prabowo membahas posisi Sandiaga saat ini, yang santer disebut akan maju di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek meminta Sandiaga Uno untuk berpacu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto apabila ingin bergabung dengan PPP.

Plt Ketua Umum PPP Mardiono berharap Sandiaga bisa bergabung dengan partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Kalau Pak Sandiaga mau gabung ke PPP, ya pamitnya dengan Pak Prabowo," ujar Awiek kepada wartawan, Kamis (23/3) lalu. ● han

Pemerintah Minta DPR Tunda Pembahasan Revisi UU Narkotika

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Pemerintah minta ditunda karena ingin UU Narkotika tersebut digabung dengan RUU terkait Psikotropika.

"Sudah ada panja (panitia kerja) beberapa kali, tetapi kita minta ditunda sementara untuk menggabungkan UU Narkotika, dengan UU Psikotropika," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Sebagaimana diketahui,

revisi UU Narkotika menjadi usulan pemerintah. Selain itu, revisi UU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah periode 2020-2024.

Yasonna berharap proses pembahasan RUU tersebut bisa segera diselesaikan sebelum akhir 2024.

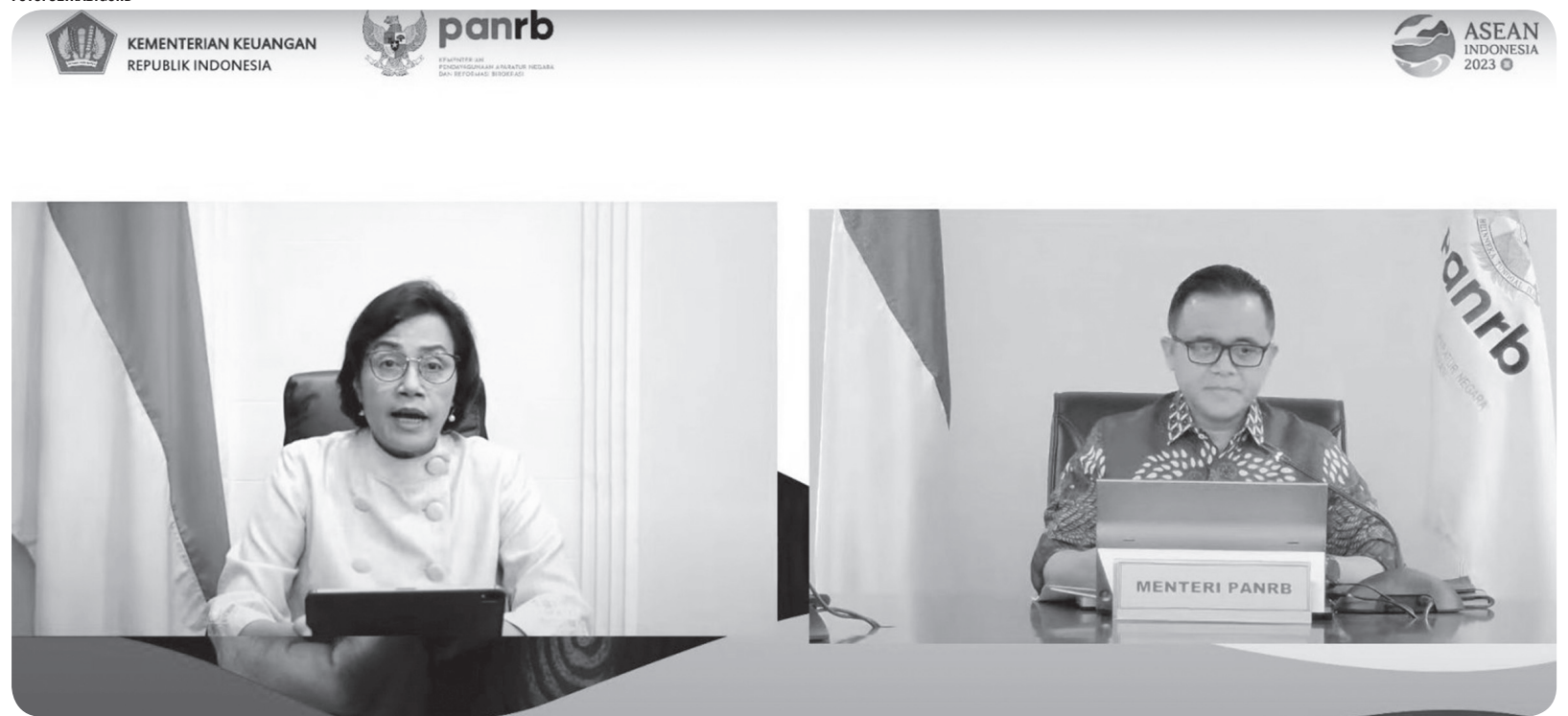
"Kita berharap bisa kita selesaikan sebelum periode kita berakhir," ujarnya.

Ia mengatakan, jika disahkan, UU Narkotika bakal menjadi salah satu peningkatan penting dari pemerintah dan anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Kalau bisa kita selesaikan UU Narkotika ini, betul-betul capaian signifikan, termasuk di dalamnya penguatan *integrity crime justice system*," kata Yasonna. ● han

2 Polhukam

FOTO: SETKAB.GO.ID



KETERANGAN PERS PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN THR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri PANRB (Pendidikan, Kebudayaan, dan Reformasi Birokrasi) Abdullah Azwar Anas mengenai pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2023, secara daring, Rabu (29/3). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 bagi aparatur negara, termasuk pensiunan.

Uang Korupsi Bupati Kapuas Diduga Untuk Bayar Survei Poltracking dan Indikator Politik

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, uang yang diterima Ben Brahim dan istrinya mencapai Rp 8,7 miliar.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyebut, uang hasil korupsi Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan Istrinya selaku anggota DPR RI, Ary Egahni, diduga dipakai untuk membayar dua lembaga survei nasional, Poltracking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, temuan adanya aliran dana korupsi untuk membayar dua lembaga

survei itu dari hasil pemeriksaan.

"Sejauh ini, informasi yang kami terima dari hasil pemeriksaan betul ya (uang korupsi untuk bayar Poltracking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia)," kata Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (29/3).

Meski demikian, kata Ali, KPK masih perlu mendalami lebih lanjut mengenai aliran dana hasil korupsi tersebut. Nantinya, persoalan itu akan ditelisik oleh tim penyidik

dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Adapun uang untuk membayar lembaga survei itu diduga bersumber dari pos anggaran resmi yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pembk) Kapuas dan beberapa pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, uang yang diterima Ben Brahim dan istrinya mencapai Rp 8,7 miliar.

"Mengenai besaran jumlah uang yang diterima Ben Brahim dan Ary sejauh ini sejumlah sekitar Rp 8,7 miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar

2 lembaga survei nasional," kata Johanis dalam konferensi pers di KPK, Rabu (29/3).

Ben Brahim juga diduga menerima fasilitas dari berbagai SKPD di Kapuas. KPK juga menduga istri Ben Brahim, Ary diduga aktif ikut campur dalam urusan Pemkab Kapuas.

Salah satunya dengan memerintahkan Kepala SKPD memenuhi kebutuhan pribadinya.

"Dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah," ujar Tanak.

Selain itu, uang panas itu juga digunakan Ben Brahim untuk biaya operasional saat mengikuti

pemilihan Bupati Kapuas dan pemilihan gubernur Kalimantan Tengah,

"Termasuk untuk keikutsertaan Ary Egahni yang merupakan istri Ben Brahim dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI di tahun 2019," tutur Tanak.

Ben Brahim dan istrinya, Ary telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Keduanya ditahan per Selasa (28/3).

Sejauh ini Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini.

● han

Sejumlah Dokumen Disita KPK dari Rumah dan Kantor Bupati Kapuas

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah selesai mengeledah rumah pribadi dan kantor Bupati Kapias, Ben Brahim S Bahat (BBSB), di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (28/3).

"Tim Penyidik telah selesai melakukan pengeledahan di dua lokasi berbeda yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalteng. Lokasi di maksud yaitu rumah kediaman pribadi tersangka BBSB dan Kantor Bupati Kapuas," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (29/3).

Dari kedua lokasi tersebut, petugas KPK mengamankan dokumen yang diduga berkaitan dengan korupsi pemotongan anggaran dan penerimaan suap Ben Brahim S Bahat. Dokumen tersebut selanjutnya akan dianalisis guna proses penyitaan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen-dokumen yang dapat menerangkan

dugaan perbuatan para tersangka," terang Ali.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan dan nantinya akan dikonfirmasi pada para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik," sambungnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat dan istrinya, Ary Egahni yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi NasDem sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemotongan anggaran Pemkab Kapuas dan penerimaan suap.

Ben Brahim dan istrinya diduga bekerja sama untuk memperkaya diri dengan meminta para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kapuas memenuhi fasilitas serta kebutuhan pribadi. Di mana sumber uang tersebut berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Kapuas.

Tak hanya itu, Ben Brahim juga diduga menerima suap dari pihak swasta di Kabupaten Kapuas. Adapun, uang suap yang diterima Ben

berkaitan dengan pemberian izin lokasi perkebunan di Kabupaten Kapuas.

Total, Ben menerima uang dari hasil pemotongan anggaran hingga penerimaan suap sebesar Rp8,7 miliar. Sebagian dari uang panas Ben dan istrinya tersebut diduga mengalir ke dua lembaga survei nasional.

KPK menduga uang hasil korupsi tersebut digunakan Ben dan Ary untuk ongkos politik. Ben Brahim menggunakan uang haram tersebut untuk maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Kapuas dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah. Sedangkan Ary Egahni untuk maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Atas perbuatannya, pasutri tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ● han

Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama dan Idul Fitri 19-25 April 2023

JAKARTA (IM) - Pemerintah telah memutuskan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M jatuh pada tanggal 19-21 April dan 24-25 April 2023. Sementara itu, Hari Raya Idul Fitri ditetapkan tanggal 22 dan 23 April 2023, sebagai hari libur nasional Lebaran.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di gedung Kemkeno PMK, Rabu (29/3).

Ia menyampaikan, libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri ini diubah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Maret 2023.

"Rapat tingkat menteri menindaklanjuti arahan Pak Presiden Jokowi pada rapat internal tanggal 24 Maret 2023 di mana presiden meminta agar libur cuti bersama tanggal 21 dan 24-25 April sesuai SKB 3 menteri tanggal hari libur diubah menjadi tanggal 19-21 dan 24-25 April," kata Muhadjir, Rabu (29/3).

Muhadjir menyampaikan, setelah mendapat arahan tersebut, pihaknya segera melaksanakan rapat guna mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang telah ditandatangani tahun lalu pada 29 Maret 2022.

Rapat dihadiri oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Ketenaga-

kerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Dalam hal ini cuti bersama bergeser lebih maju dan ditambah satu hari tanggal 19 April. Sehingga ada penambahan satu hari libur Idul Fitri tahun 2023 ini," katanya.

Pertimbangan menggeser libur cuti bersama dan menambah satu hari adalah untuk menambah kesempatan pada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga menghindarkan penumpukan massa pada puncak mudik yang waktunya bersamaan, yakni 21 April 2023.

Diketahui, sebelum diubah dan dievaluasi, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H ditetapkan tanggal 21 dan 24-26 April 2023. Hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2023 ini sudah disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenuk) dan tiga kementerian terkait.

Kementerian-kementerian tersebut, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Kesepakatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023. ● mci



WAMENKUMHAM TINJAU LAPAS DAN RUTAN DI PADANG

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hdiej (kanan) berbincang dengan Kepala Rutan Muhammad Mehdi (kierua kanan) saat meninjau dapur umum Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Padang, Sumatera Barat, Rabu (29/3). Wamenkumham meninjau Lapas Perempuan Kelas IIB Padang, Rutan kelas IIB Padang, dan Lapas Kelas IIA Padang untuk memastikan pembinaan terhadap warga binaan berjalan dengan baik.

INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

Kantor Cabang Pembantu Graha KEPRI

Jalan Engku Putri
Batam - 29421

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin
Kantor Batam (0778) 458725

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin

PENGUMUMAN LIKUIDASI
PT ALFA MEDIKA NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT ALFA MEDIKA NUSANTARA tanggal 10 Maret 2023, telah diputuskan menyetujui pembubaran atau likuidasi Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2023.
Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tagihan/klaim atau keberatan kepada likuidator Perseroan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini dengan menyiapkan bukti-bukti yang sah, ditunjukkan ke alamat sebagai berikut:
PT ALFA MEDIKA NUSANTARA
Jl. Ciputat Raya No.4B, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Jakarta, 30 Maret 2023
Ttd.
LIKUIDATOR

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 27 Maret 2023 yang telah dinyatakan dalam akta nomor 19 tertanggal 27 Maret 2023, dibuat di hadapan KIRANA HYMINERVA WILAMARTA, SH, LL.M., Notaris di Jakarta, Keputusan Para Pemegang Saham PT. BANDUNG MOTOR WIRATAMA, berkedudukan di Kota Bandung (Perseroan) telah memutuskan untuk menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, yang semua Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah), yang sebagian tambahan penyetorannya dilakukan dengan cara mengkompensasikan tagihan para pemegang saham terhadap Perseroan. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.
Jakarta, 30 Maret 2023
PT BANDUNG MOTOR WIRATAMA
Direksi